HASTO APRESIASI GERAK CEPAT DEWAN

Raperda Larangan Minuman Oplosan Miras Segera Disahkan

YOGYA (KR) - Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan sudah masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat atau pekan depan regulasi yang tengah menjadi sorotan publik tersebut dapat segera disahkan.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Sinarbijat Nujanat, menjelaskan panitia khusus (pansus) yang membahas raperda terkait minuman oplosan tersebut telah melaporkan perkembangan pembahasan. "Minggu-minggu ini sudah akan disahkan. Tergolong sesuai dengan target awal bahwa bisa ditetapkan pada triwulan pertama tahun ini," tandasnya usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Senin (10/3).

Tahun ini total ada 12 produk hukum yang masuk dalam Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025. Seluruhnya juga sudah dijadwalkan target penyampaian untuk dibahas berdasarkan triwulan. Pada triwulan pertama atau sampai akhir Maret terdapat tiga raperda yang seharusnya dibahas. Hal itu pun sudah mampu terpenuhi yakni seiring ketugasan tiga pansus yang dibentuk. Selain pansus raperda terkait minuman oplosan tersebut, dua raperda lain yakni pajak dan retribusi daerah serta raperda terkait pemajuan kebudayaan.

Raperda terkait minuman oplosan sejak awal telah menjadi perhatian publik seiring dorongan dari masyarakat atas maraknya peredaran miras. Bahkan pada kinerja DPRD Kota Yogya periode sebelumnya, raperda tersebut sempat masuk dalam target namun akhirnya ditangguhkan seiring dinamika politik. Kini, setelah ada dua warga Kota Yogya yang meninggaldunia akibat minuman oplosan, raperda itu kembali menjadi sorotan publik. "Alhamdulillah semua bisa dilakukan percepatan. Jadi tidak hanya minuman oplosan yang dilarang, tetapi peredaran miras juga turut dikendalikan dan diawasi. Semangatnya lebih pada itu, dan saya kira pansus juga sudah menjarinng banyak masukan dari masyarakat," urai Sinarbijat.

Menurutnya, maraknya peredaran miras kala itu lantaran akses perizinan yang sangat mudah melalui sistem online single submission (OSS). Akan tetapi dalam regulasi yang baru nanti, meski sudah mengantongi OSS namun wajib memproses izin di walikota untuk bisa mengedarkan ke masyarakat. Tempat untuk penjualan serta kelas atau kadar alkohol juga dibatasi. Termasuk tidak bisa menjual secara daring maupun mengecer di toko-toko kecil melainkan harus sejenis bar dan lain sebagainya. Sedangkan minuman oplosan yang selama ini kerap merenggut korban jiwa, secara jelas dilarang diperjualbelikan. "Semangatnya ialah pengawasan dan pengendalian. Tentu kalau sudah ada payung hukum, maka penegakannya akan lebih optimal," tandasnya.

Sementara Walikota Yogya Hasto Wardoyo, mengapresiasi gerak cepat dewan dalam menuntaskan pembahasan raperda. Dirinya ikut prihatin atas meninggalnya dua pemudi warga Kota Yogya akibat konsumsi minuman oplosan. Dirinya juga optimis kehadiran raperda itu kelak menjadi daya dorong yang kuat dalam melindungi generasi muda dari bahaya minuman keras.

"Dewan yang sekarang ini sangat enerjik. Saya apresiasi sekali. Tidak hanya cepat tapi juga cermat dan detail ketika membahas sesuatu. Saya bahkan sangat optimis Propemperda tahun ini bisa tuntas dalam satu tahun anggaran," urainya. **(Dhi)-d**

AJAK MASYARAKAT IKUT BERPERAN AKTIF

Sampah Dikosongkan, Area Depo Diperindah

YOGYA (KR) - Selain masih terus berupaya mempercepat pengosongan depo dari tumpukan sampah, Pemkot Yogya juga akan melakukan pembenahan. Terutama memperindah area depo yang sudah bersih dari sampah sekaligus untuk meningkatkan pengelolaan limbah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Walikota Yogya Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan dan revitalisasi depo sampah. Perbaikan ini mencakup penyemenan area depo, pembangunan saluran resapan untuk lindi serta penyediaan fasilitas cuci tangan bekerja sama dengan PDAM.

"Taman di sekitar Depo THR juga akan diperindah agar lingkungan tetap asri dan nyaman bagi masyarakat," tandasnya, Senin (10/3).

Perbaikan di lingkungan depo tentu baru bisa efektif ketika depo sudah dalam keadaan kosong. Oleh karena itu beberapa depo yang sudah berhasil dikosongkan dari sampah, mulai dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Harapannya kesan depo yang selama ini kumuh dan berbau, lambat laun bisa berubah seiring lingkungan yang asri.

Hasto juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk memastikan program pengurangan sampah dapat berjalan dengan baik.

"Kami berharap depo sampah yang sudah kosong tidak dipenuhi lagi. Sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dibawa ke bank sampah. Untuk sisa makanan, dapat menggunakan ember tumpuk atau teknologi biopori yang sederhana namun efektif dalam mengurangi sampah yang dibuang," imbuhnya.

Peran aktif masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan sampah bernilai guna justru merupakan tujuan utama program pengelolaan sampah. Hal ini karena dengan kepedulian yang terbangun menunjukkan budaya baik di masyarakat sudah terbentuk. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah bisa terus bersinergi dalam mengurangi sekaligus mendayagunakan sampah dengan baik.

Sementara dalam upaya mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah, Pemkot Yogya mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan sampah dikumpulkan melalui penggerobak di setiap RW sebelum diangkut ke depo. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah sampah yang masuk serta memastikan pemilahan sampah dilakukan sejak dari rumah tangga.

"Pengadaan gerobak sampah ini membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat bulan. Ini karena anggarannya diambilkan dari pengalihan alokasi pengadaan mobil dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota. Pengalihan ini membutuhkan waktu agar sesuai dengan aturan," imbuh Hasto.

Dirinya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ajakan tersebut bahkan selalu ia sampaikan ketika bertemu warga dalam berbagai kesempatan. Terutama setiap safari Ramadan ketika salat tarawih maupun salat Subuh berjamaah.

Salah satu warga Danunegaran, Hari Sudibyo, mengapresiasi langkah Pemkot Yogya dalam menangani permasalahan sampah di wilayahnya. Menurutnya kebijakan pembuangan sampah melalui penggerobak bisa membantu memperlancar proses pengelolaan sampah di masyarakat. Namun, ia juga berharap agar proses pengadaan fasilitas bagi penggerobak dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu dekat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas dalam pelaksanaan program tersebut. Aturan yang tegas dan terarah akan membantu sistem pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. **(Dhi)-d**

BERTEMU SRI SULTAN HB X

Kanwil Imigrasi DIY Akan Buka Kantor di Kulonprogo

KR-Riyana Ekawati

Junita Sitorus (tengah) memberikan keterangan kepada media seusai bertemu dengan Sri Sultan HB X.

YOGYA (KR) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY Junita Sitorus bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Senin (10/3). Selain memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, Junita juga meminta izin kepada Sri Sultan HB X untuk membuka kantor pelayanan imigrasi di Kulonprogo.

"Memang, sejak dilantik, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memerintahkan kami untuk melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Bahkan bukan hanya pemerintah daerah setempat, koordinasi juga harus dilakukan bersama instansi vertikal yang ada di lokasi kami bertugas," kata Junita Sitorus seusai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Junita mengatakan, selain memperkenalkan diri, pihaknya juga menyampaikan isu-isu keimigrasian yang sangat strategis di DIY. Salah satunya, rencana mendirikan kantor imigrasi di Kulonprogo.

"Kami minta dukungan Bapak Gubernur untuk pembentukan kantor imigrasi Kulonprogo dan disambut dengan baik. Bahkan beliau bilang, kalau ada hal-hal yang sangat urgent, beliau siap membantu dan siap berkomunikasi," ujarnya.

Sedangkan Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan, dalam pertemuan itu Gubernur DIY berharap Kakanwil yang baru mampu menjaga hubungan baik yang selama ini sudah terjaga. Mengingat masih banyak persoalan terkait imigrasi, terutama yang berkaitan dengan mobilitas warga asing di DIY. Contoh mobilitas warga asing yang sangat cepat di DIY ialah para mahasiswa asing. Saat ini, ada sekitar 2.000-an mahasiswa asing di DIY yang tersebar di banyak perguruan tinggi. "Mengenai warga asing ini, pada dasarnya tetap kami lakukan pengawasan. Dan yang terpenting, izin yang mereka bawa untuk tinggal di DIY itu jelas, untuk belajar atau bekerja," tegasnya. **(Ria)-d**

LIBUR LEBARAN, TOL PRAMBANAN DIBUKA

Dishub DIY Siapkan Sejumlah Strategi

YOGYA (KR) - Banyaknya jumlah kendaraan dan pemudik yang masuk ke wilayah DIY saat libur Lebaran membutuhkan perhatian dan penanganan ekstra. Menyikapi hal itu Dinas Perhubungan (Dishub) DIY fokus mengantisipasi potensi kemacetan di jalur tol Prambanan yang diprediksi menjadi titik rawan saat arus mudik Lebaran 2025. Antisipasi itu dilakukan dengan harapan bisa mengurangi terjadinya kemacetan yang sering terjadi saat libur lebaran.

"Kami akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Apalagi jalur tol Prambanan yang akan dibuka berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan. Berkaca dari libur panjang sebelumnya, Prambanan menjadi salah satu titik rawan kemacetan. Oleh karena itu, kami akan melakukan penyesuaian lalu lintas di area itu untuk mengurangi terjadinya kemacetan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub DIY, Wiyos Santoso di Yogyakarta, Senin (10/3).

KR-Riyana Ekawati

Wiyos Santoso

Wiyos mengatakan, selain beberapa hal di atas untuk mengurangi terjadinya kemacetan, Dishub DIY telah mempersiapkan jalur alternatif. Diantaranya melalui Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dijadikan salah satu opsi bagi pemudik dari arah timur. Nantinya jalur itu akan mengarahkan pengendara turun melalui Panggang hingga ke Imogiri, meskipun jalurnya cenderung kecil dan ekstrem. Selain itu, diperkirakan jalur utara akan sedikit berkurang penggunaannya, karena banyak pemudik dari Jakarta yang keluar di tol Prambanan. Menghadapi potensi penumpukan, Dishub DIY akan berkoordinasi dengan pihak Pemkab Sleman untuk mengatur lampu lalu lintas atau membuka jalur alternatif apabila diperlukan.

"Kami sudah menyiapkan sejumlah strategi agar masyarakat yang ingin merayakan bisa merasa nyaman. Karena kelancaran arus mudik dan balik Lebaran menjadi salah satu prioritas perhatian kami," ungkapnya.

Lebih lanjut Wiyos menambahkan, kebijakan memajukan libur sekolah yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa menghindari penumpukan arus mudik pada satu tanggal tertentu. Dengan libur yang dimulai lebih awal, diharapkan arus perjalanan dapat terdistribusi secara bertahap mulai 23 Maret 2025.

Sementara itu terkait dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN, Wiyos mengimbau, agar mereka yang berencana bepergian ke luar kota mengajukan jadwal lebih awal. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur kepadatan lalu lintas dan memastikan perjalanan lebih terencana. **(Ria) -d**

IPUNG PURWANDARI FRAKSI PDI PERJUANGAN

Persaingan Makin Ketat, Pariwisata Yogya Harus Unggul

YOGYA (KR) - Hampir setiap daerah kini semakin gencar membangun destinasi pariwisata. Hal ini berimbas pada persaingan antardaerah yang semakin ketat. Sebagai daerah yang banyak menggantungkan dari aktivitas wisata, maka sampai kapan pun industri pariwisata di Yogya harus tetap unggul.

Anggota DPRD Kota Yogya dari Fraksi PDI Perjuangan Ipung Purwandari, mengaku perekonomian di Kota Yogya sebagian besar digerakkan oleh aktivitas pariwisata. Mulai dari industri akomodasi seperti perhotelan, transportasi, perdagangan, kerajinan dan lain sebagainya. "Ketika banyak kunjungan di Kota Yogya maka berdampak pula terhadap pajak daerah baik pajak hotel maupun pajak restoran. Begitu pula omset para pelaku usaha maupun UMKM yang ikut naik. Ini kita rasakan betul bahwa aktivitas wisata mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di kota ini," tandasnya, Senin (10/3).

Di sisi lain, ketika Kota Yogya tidak berbenah sementara daerah lain tidak berhenti melakukan pengembangan maka menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan industri pariwisata ke depan. Hal ini karena Yogya tidak memiliki destinasi wisata alam sehingga sangat mengandalkan pada destinasi yang sudah ada.

Ipung yang duduk di Komisi B ini pun menaruh harapan bagi Hasto-Wawan dalam membenahi industri pariwisata di Kota Yogya. Selain memperkuat kharisma budaya yang menjadi keunggulan Kota Yogya, keberadaan kampung wisata juga perlu dipoles lebih menarik dan atraktif. Selama ini kampung wisata menyimpan potensi yang tidak kalah menarik dari daerah lain serta memiliki nilai kontinuitas seiring dikelola oleh masyarakat setempat. "Tugu, Malioboro dan Kraton memang masih dan akan terus menjadi destinasi unggulan di Kota Yogya. Tetapi jika semakin banyak kampung wisata yang mampu mandiri dan siap menerima wisatawan, tentu semakin membuka alternatif kunjungan. Lama tinggal wisatawan juga bisa semakin panjang," urainya.

Akan tetapi, Ipung juga mengingatkan akan pentingnya sikap para pelaku dalam menyambut wisatawan. Siapapun yang aktivitasnya di Kota Yogya justru menjadi tuan rumah bagi tamu yang datang. Terutama para pelaku yang berhadapan langsung dengan wisatawan seperti juru parkir, penjual kuliner, toko oleh-oleh, tukang becak, kusir andong dan sebagainya. Sikap keramah tamahan dalam melayani wisatawan akan memperkuat kesan Yogya yang santun dan penuh pesona.

Oleh karena itu, Ipung yang juga menggeluti industri pariwisata ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu membangun industri wisata yang mengesankan. Apalagi dalam waktu dekat atau tiga pekan ke depan sudah memasuki momentum Lebaran yang selalu diimbangi dengan melonjaknya wisatawan di Kota Yogya. Terhubungnya jalan tol dipastikan juga akan mempengaruhi tingkat kunjungan dengan kendaraan pribadi.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk kota ini. Kami di lembaga dewan juga tidak akan pernah berhenti dalam mengawal kinerja eksekutif. Mari kita tunjukkan bahwa Yogya selalu menjadi tempat untuk kembali. Kesan baik yang dirasakan oleh wisatawan, akan membawa banyak hal baik pula bagi kota kita tercinta ini," tandasnya. **(Dhi)-d**

KR-Ardhi Wahdan

SETJEN DPD RI DAN KAPASGAMA

Gelar Seminar Nasional Reformasi Polri

YOGYA (KR) - Setjen DPD RI kerja sama Kapasgama UGM akan menggelar Seminar Nasional Reformasi Polri, di ruang Auditorium Lt 5 Gedung Sekolah Pasca Sarjana UGM, Kamis (13/3), dengan mengusung tema 'Mewujudkan Polri Yang Bermartabat, Profesional dan Berintegritas'.

Narasumber yang dihadirkan Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIK MH (Kapolda DIY), Eko Riyadi SH MHum (Dosen FH UII/Direktur Pusham UII), Dr Budi Wahyuni MM MA (Komisioner Komnas Perempuan RI 2015-2019). Selain itu narasumber lain adalah Dr Trisno Raharjo SH MHum (Dosen FH UMY), Dr Zaenal Arifin Mochtar SH LLM (Pakar HTN FH UGM/Peneliti Pukat), Jusman Dalle (Digital Strategist Consultant) dengan key note speaker H Tamsil Linrung (Waka DPD RI).

"Polri memang telah menjadi sorotan publik, karena beberapa alasan. Ada empat faktor penyebab Polri dianggap telah melenceng dari tujuan sebagai pengayom dan pelindung rakyat," kata Wahyudi JN, Ketua panitia seminar Nasional Reformasi Polri, saat bersilaturahmi dengan Pemred *KR* Dr H Octo Lampito MPd, di Jalan Margo Utomo 40 Yogya, Senin (10/3).

KR-Abrar

Panitia seminar nasional reformasi Polri saat di KR.

Wahyudi JN didampingi panitia lainnya, Dr Khamim Zarkasih P (Ketua Kapasgama UGM), Akhir Lusono (Tim Perumus), Windra YS (panitia), Wahyu Hidayat (Tim Perumus), Happy Susanto (Sekretaris), dan Sri Samiasih (Bendahara).

Disampaikan Khamim, target peserta seminar kuotanya dibatasi sebanyak 200 orang. Bagi yang berminat untuk mengikuti seminar nasional Reformasi Polri dapat mendaftar dengan menghubungi panitia penyelenggara CP 08174849877 (Happy Susanto) atau Link pendaftaran :https://bit.ly/seminarpolri. **(Rar)-d**